

ABSTRAK

Negara Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang dan tengah banyak melakukan pembangunan di segala bidang. Indonesia memiliki beberapa bentuk penerimaan bagi kas negara, salah satu berasal dari pajak. Oleh karena itu penerimaan pajak sangat penting akan tetapi, masih banyak warga Negara Indonesia yang tidak mengerti pentingnya pembayaran pajak. Mereka justru berusaha mengurangi jumlah pajak atau bahkan menunda pembayaran pajak, hal ini yang menyebabkan timbulnya tunggakan pajak. Oleh sebab, itu pemerintah berusaha mengatasi tunggakan pajak tersebut dengan melakukan proses penagihan pajak, yang terbagi menjadi dua bagian yaitu penagihan pasif dan penagihan aktif. Penagihan pasif seperti penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding. Sedangkan penagihan aktif dilakukan dengan mengirimkan Surat Teguran, Surat Paksa, SPMP, Pengumuman Lelang, Pelaksanaan Lelang.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan proses penagihan pajak dalam upaya pencairan tunggakan pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang. Objek dalam penelitian ini adalah KPP Pratama Bojonagara Bandung.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 2006 dan 2007 menunjukkan bahwa proses pencairan tunggakan pajak yang dilaksanakan di KPP Pratama Bojonagara Bandung telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada, dan penulis mengambil kesimpulan bahwa target pencairan dengan realisasi pencairan pajak pada tahun 2006 sudah tercapai, hal ini mungkin disebabkan penerbitan Surat Paksa, dan banyaknya Wajib Pajak yang kooperatif dalam melunasi utang pajaknya. Sedangkan target pencairan dengan realisasi pencairan pajak pada tahun 2007 tidak tercapai, hal ini mungkin disebabkan adanya Wajib Pajak yang pindah alamat dan banyaknya Wajib Pajak yang mengajukan SK Keberatan, Banding, dsb. sehingga proses penagihan jadi terhambat. Adapun target pencairan tersebut adalah 30% dari saldo tunggakan awal. Proses pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Bojonagara pada tahun 2006 dan tahun 2007 dapat dikatakan tidak berhasil karena dilihat dari tunggakan pajak yang semakin besar dari tahun 2006 ke tahun 2007. Sedangkan pencairan tunggakan pajak justru menurun.

Adapun hambatan yang masih dihadapi dalam upaya pencairan tunggakan pajak seperti kesulitan banyaknya Wajib Pajak yang telah pindah alamat, kesulitan dalam menentukan objek sita Wajib Pajak, banyaknya Wajib Pajak mengajukan SK Keberatan, Banding, dsb., objek Sita atau objek lelang sudah lebih dahulu disita atau dilelang pihak lain, misalnya bank. Upaya yang telah dilakukan KPP Pratama Bojonagara Bandung dalam mengatasi kendala-kendala tersebut adalah berusaha semaksimal mungkin mencari informasi tentang Wajib Pajak yang pindah alamat tersebut, dari berbagai pihak yang kompeten atau instansi-instansi yang berada dekat dengan alamat Wajib Pajak sebelum pindah, meningkatkan tindakan persuasif, misalnya seperti Kantor Pelayanan Pajak membuka konseling bagi Wajib Pajak yang mengalami masalah, dan lain-lain.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAKS	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	3
1.3 Tujuan Penulisan	3
1.4 Kegunaan Penelitian	4
1.5 Rerangka Pemikiran	5
1.6 Metode Penelitian	8
1.7 Lokasi Penelitian	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pajak	10
2.1.1 Definisi Pajak	10
2.1.2 Fungsi Pajak	11

2.1.3	Pengelompokan Pajak.....	12
2.1.4	Asas Pemungutan Pajak.....	13
2.1.5	Sistem Pemungutan Pajak.....	14
2.1.6	Tarif Pajak.....	15
2.1.7	Cara Menentukan Besarnya Pajak.....	16
2.2	Tunggakan Pajak.....	17
2.2.1	Definisi Tunggakan Pajak.....	17
2.2.2	Pencairan Tunggakan Pajak.....	17
2.3	Penagihan Pajak.....	18
2.3.1	Definisi Penagihan Pajak.....	18
2.3.2	Pejabat dan Jurusita.....	19
2.3.2.1	Pejabat.....	19
2.3.2.2	Jurusita Pajak.....	20
2.3.3	Dasar Penagihan Pajak.....	21
2.3.4	Jenis Dan Pelaksanaan Penagihan Pajak.....	33
2.3.4.1	Jenis Penagihan Pajak.....	33
2.3.4.2	Pelaksanaan Penagihan Pajak.....	36
2.3.4.2.1	Surat Teguran.....	36
2.3.4.2.2	Surat Paksa.....	37
2.3.4.2.3	Penyitaan.....	40
2.3.4.2.4	Hak Mendahulu.....	42
2.3.4.2.5	Lelang.....	43
2.3.5	Biaya Penagihan Pajak.....	45
2.3.6	Penagihan Seketika Dan Sekaligus.....	46

2.3.7 Pencegahan Dan Penyanderaan.....	48
2.3.7.1 Pencegahan.....	48
2.3.7.2 Penyanderaan.....	48
2.3.8 Daluwarsa Penagihan Pajak.....	50
2.3.9 Penghapusan Piutang Pajak.....	51
2.4 Gugatan.....	52
2.5 Pembetulan Dan Penggantian Surat.....	53
2.6 Keberatan Dan Banding.....	53
2.6.1 Keberatan.....	53
2.6.2 Banding.....	55
2.7 Pemblokiran Dan Penyitaan Harta Kekayaan Yang Tersimpan	
Di Bank.....	56
2.8 Dasar Hukum Proses Penagihan Pajak.....	58

BAB 3 OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian.....	64
3.2 Metode Penelitian.....	64
3.3 Sejarah Singkat KPP Pratama Bojonagara Bandung.....	67
3.4 Visi Dan Misi KPP Pratama Bojonagara Bandung.....	70
3.4.1 Visi KPP Pratama Bojonagara Bandung.....	70
3.4.2 Misi KPP Pratama Bojonagara Bandung.....	70
3.5 Struktur Organisasi KPP Pratama Bojonagara Bandung.....	71
3.6 Uraian Tugas.....	73

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisa Penerapan Proses Penagihan Pajak Dalam Upaya Pencairan	
--	--

Tunggakan Pajak Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Bojonagara.....	76
4.1.1 Proses Penagihan Pajak Pasif.....	76
4.1.2 Proses Penagihan Pajak Aktif.....	78
4.1.2.1 Penerbitan Surat Teguran.....	78
4.1.2.2 Penerbitan Dan Pelaksanaan Surat Paksa.....	79
4.1.2.3 Pengeluaran Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan... ..	80
4.1.2.4 Pengajuan Permintaan Jadwal, Waktu, Dan Tempat Pelelangan.....	82
4.1.3 Proses Penagihan Pajak Dalam Upaya Pencairan Tunggakan Pajak.....	84
4.1.3.1 Pelaksanaan Proses Penagihan Pajak Dalam Upaya Pencairan Tunggakan Pajak.....	84
4.2 Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Penagihan Pajak Dan Upaya-Upaya Yang Dilakukan KPP Pratama Bojonagara Bandung Untuk Mengatasinya.....	89
4.2.1 Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Penagihan Pajak Di KPP Pratama Bojonagara Bandung.....	89
4.2.2 Upaya-upaya Yang Telah Dilakukan KPP Pratama Bojonagara Bandung Dalam Mengatasi Kendala -kendala Selama Proses Penagihan Pajak.....	90
4.2.3 Analisa Tunggakan Pajak Dan Kegiatan Penagihan Tahun 2006 Dan Tahun 2007 Di KPP Pratama Bojonagara Bandung.....	91

4.2.3.1 Analisa Tunggalan Pajak Tahun 2006 Dan Tahun 2007.....	91
4.2.3.2 Analisa Perbandingan Target Dan Realisasi Pencairan Dari Tunggalan Awal Tahun 2006 Dan Tahun 2007.....	96
4.2.3.3 Analisa Kegiatan Penagihan Aktif Tahun 2006 Dan Tahun 2007.....	99
4.2.3.4 Analisa Perbandingan Target Dan Realisasi Kegiatan Penagihan Aktif Tahun 2006 Dan Tahun 2007.....	101
4.2.3.5 Analisa Keseluruhan.....	103

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan.....	108
5.2 Saran.....	109

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS (*CURRICULUM VITAE*)

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Struktur Organisasi KPP Pratama Bojonagara Bandung.....	72
Gambar 4.1	Proses Penagihan Pajak.....	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penerimaan Dalam Negeri Tahun 2006 dan Tahun 2007.....	1
Tabel 2.1	Tarif Progresif PPh WP Pribadi.....	15
Tabel 2.2	Tarif Progresif PPh WP Badan Dan Bnetuk Usaha Tetap	16
Tabel 4.1	Laporan Tunggalan Pajak Triwulanan Tahun 2006.....	92
Tabel 4.2	Laporan Tunggalan Pajak Triwulanan Tahun 2007.....	94
Tabel 4.3	Perbandingan Target Dan Realisasi Pencairan Dari Tunggalan Awal Tahun 2006.....	97
Tabel 4.4	Perbandingan Target Dan Realisasi Pencairan Dari Tunggalan Awal Tahun 2007.....	98
Tabel 4.5	Laporan Kegiatan Penagihan Aktif Triwulanan Tahun 2006.....	99
Tabel 4.6	Laporan Kegiatan Penagihan Aktif Triwulanan Tahun 2007.....	100
Tabel 4.7	Perbandingan Target Dan Realisasi Kegiatan Penagihan Aktif Tahun 2006.....	102
Tabel 4.8	Perbandingan Target Dan Realisasi Kegiatan Penagihan Aktif Tahun 2007.....	102
Tabel 4.9	Realisasi Pencairan Tunggalan Pajak Tahun 2006 Dan Tahun 2007.....	104
Tabel 4.10	Laporan Jumlah Tunggalan Pajak Dan Realisasi Pencairan Pajak Tahun 2006 Dan Tahun 2007.....	105

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Ijin Penelitian/ Pengumpulan Data Dalam Rangka Penyusunan Skripsi/ Tesis Dari Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah Jawa Barat I
- Lampiran 2 Surat Ijin Pengumpulan Data/ Penelitian Dari Kantor Pelayanan Pajak/ KPP Pratama Bojonagara Bandung.
- Lampiran 3 Surat Pernyataan Pengumpulan Data Di KPP Pratama Bojonagara Bandung.
- Lampiran 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000, Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Lampiran 5 Format SPT Tahunan Wajib Pajak/ Orang Pribadi (Lampiran 1 -2).
- Lampiran 6 Format SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (Lampiran 2-4).
- Lampiran 7 Format SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (Lampiran 2-6).
- Lampiran 8 Format Surat Tagihan Pajak.
- Lampiran 9 Format Surat Ketetapan Kurang Bayar PPh Pasal 23.
- Lampiran 10 Format Surat Ketetapan Kurang Bayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi/ Badan.
- Lampiran 11 Format Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan nilai Barang Dan Jasa.
- Lampiran 12 Format Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan Orang Pribadi/ Badan.
- Lampiran 13 Format Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika Dan Sekaligus.
- Lampiran 14 Format Surat Teguran.
- Lampiran 15 Format Surat Paksa.
- Lampiran 16 Format Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa.
- Lampiran 17 Format Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- Lampiran 18 Format Berita Acara Pelaksanaan Sita.
- Lampiran 19 Format Pencabutan Sita.
- Lampiran 20 Format Permintaan Pemblokiran Harta Kekayaan Penaggung Pajak Yang Trsimpan Pada Bank.
- Lampiran 21 Format Pencabutan Pemblokiran.
- Lampiran 22 Format Kesempatan Terakhir Pelunasan Hutang Pajak.
- Lampiran 23 Format Pemberitahuan Lelang.
- Lampiran 24 Format Pengumuman Lelang.
- Lampiran 25 Format Permintaan Jadwal Waktu Dan Tempat Lelang.
- Lampiran 26 Format Putusan Sengketa Pajak.
- Lampiran 27 Format Pelaksanaan Keputusan Majelis Pertimbangan Pajak.